

**PENERAPAN SANKSI DISIPLIN TERHADAP NARAPIDANA YANG  
MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
(STUDI DI LAPAS KELAS II A SIBOLGA)**

**Oleh  
Elga Frestina Nazara  
NIM. 2105040024**

**Abstrak**

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan institusi yang bertugas menjalankan pembinaan terhadap narapidana. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan, salah satunya adalah narapidana yang melarikan diri dari Lapas. Studi ini dilakukan di Lapas Kelas II A Sibolga dengan fokus pada penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah penerapan sanksi disiplin tersebut dijalankan serta kendala-kendala apa saja yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri, dengan menggunakan teori penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris dengan jumlah informan sebanyak 5 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan kajian kepustakaan. Hasil menunjukkan bahwa Penerapan sanksi terhadap narapidana yang melarikan diri di Lapas Kelas II A Sibolga dilakukan dengan mengacu pada ketentuan internal dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun terdapat kekosongan norma dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 maupun Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 yang tidak secara eksplisit menyebut tindakan "melarikan diri sebagai pelanggaran disiplin berat, permenkumham Nomor 8 Tahun 2024 hadir sebagai regulasi yang memberikan kepastian hukum dengan secara eksplisit mencantumkan "melarikan diri" sebagai pelanggaran disiplin berat. Aturan ini memperkuat posisi hukum petugas pemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi secara objektif dan proporsional. Namun, masih ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, seperti keterbatasan jumlah petugas, overkapasitas penghuni lapas, lemahnya pengawasan, serta optimalnya pembinaan terhadap narapidana. Penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana yang melarikan diri memang telah dilakukan, namun perlu evaluasi dan penguatan dari segi regulasi, sumber daya manusia, serta pengawasan eksternal agar pelaksanaan sanksi tidak melanggar prinsip pemasyarakatan dan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Sanksi Disiplin, Narapidana, Melarikan Diri.

**ENFORCEMENT OF DISCIPLINARY SANCTIONS ON INMATES WHO  
ESCAPED FROM PRISON INSTITUTIONS  
(STUDY AT CLASS II A PRISON IN SIBOLGA)**

**By**  
**Elga Frestina Nazara**  
**NIM. 2105040024**

**Abstract**

*Correctional Institutions (Lapas) are institutions tasked with providing guidance to prisoners. However, in its implementation, problems are still found, one of which is prisoners who escape from the prison. This study was conducted at the Class II A Sibolga Prison with a focus on the application of disciplinary sanctions to escaped prisoners. The purpose of this study was to find out and understand how the implementation of disciplinary sanctions was carried out and what obstacles faced by the Correctional Institution in providing disciplinary sanctions to escaped prisoners, using law enforcement theory. The research method used in this study is an empirical normative method with a total of 5 informants. Data collection techniques were carried out through interviews and literature reviews. The results show that the implementation of sanctions against escaped prisoners in the Class II A Sibolga Prison is carried out by referring to internal provisions and interpretations of applicable laws and regulations, although there is a gap in norms in the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 6 of 2013 and the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 29 of 2017 which do not explicitly mention the act of "escaping" as a serious disciplinary violation, the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 8 of 2024 is present as a regulation that provides legal certainty by explicitly listing "escaping" as a serious disciplinary violation. This regulation strengthens the legal position of correctional officers in imposing sanctions objectively and proportionally. However, obstacles are still found in its implementation, such as limited number of officers, overcapacity of prison inmates, weak supervision, and optimal guidance for prisoners. The implementation of disciplinary sanctions against escaped prisoners has indeed been carried out, but it needs evaluation and strengthening in terms of regulations, human resources, and external supervision so that the implementation of sanctions does not violate the principles of corrections and human rights.*

*Keywords: Disciplinary Sanctions, Inmates, Escape Self.*